

Beredar Kabar Ronny Sompie Dipanggil KPK terkait Hasto

Category: Hukum

written by Redaksi | 03/01/2025



ORINEWS.id – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Franky Sompie dikabarkan dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP [PDIP](#).

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, tim penyidik memanggil Ronny untuk hadir dan diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat, 3 Januari 2025.

Ronny sebelumnya dipecat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly setelah adanya keterlambatan informasi data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta ketika buronan Harun Masiku ke luar dan kembali masuk ke Indonesia sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2020 lalu.

Pada Kamis 2 Januari 2025, tim penyidik memanggil mantan Komisioner [KPU](#), Wahyu Setiawan. Namun, Wahyu Setiawan mangkir dan meminta diperiksa pada Senin 6 Januari 2025.

Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2

orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner [KPU](#) Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio F.

Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.[]